



Evaluasi Kinerja Pegawai dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Takwim Universitas Lakidende	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 1, April 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Tahmit Ansar Universitas Lakidende	
Muh. Nugas Universitas Lakidende	

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Takwim, Ansar, T., & Nugas, M. (2026). Evaluasi Kinerja Pegawai dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 1624-1631.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi inti di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Konawe. Penelitian ini dilandasi oleh pentingnya peran aparatur sebagai komponen kunci dalam mendukung keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Evaluasi kinerja dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator seperti mutu, jumlah, ketepatan waktu, efisiensi, serta keterampilan berkomunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun, masih ditemui beberapa hambatan, seperti lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, terbatasnya anggaran yang tersedia, dan adanya ketergantungan pada dana dari pemerintah daerah.

Kata Kunci: Evaluasi Kinerja, Tugas Pokok dan Fungsi, Pegawai.

Abstract

This study aims to analyze the performance of employees in carrying out their core duties and functions at the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Konawe Regency. This research is based on the significant role of the apparatus as a key component in supporting the success of government institution performance. The method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through observation, interviews, and document review. Performance evaluation was carried out based on indicators such as quality, quantity, timeliness, efficiency, and communication skills. The research findings show that the implementation of employees' main duties and functions has proceeded according to established procedures. However, several obstacles were still found, such as weak public participation in the planning process, limited available budget, and dependence on funding from the regional government.

Keywords: Performance Evaluation, Main Duties and Functions, Employees.

A. Pendahuluan

Dalam struktur pemerintahan, badan memegang peran yang sangat vital dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi wewenangannya. Badan mempunyai tanggung jawab yang lebih kompleks dan bersifat strategis, mencakup aspek perencanaan, pengembangan, hingga pengawasan. Pada masa kini, unsur pokok dalam sumber daya manusia adalah pegawai sebagai subjek yang memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemerintahan. Pada masa kini, unsur pokok dalam sumber daya manusia adalah pegawai sebagai subjek yang memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemerintahan. Pegawai diharapkan dapat mengabdikan kepada negara serta memberikan layanan optimal kepada masyarakat dengan memanfaatkan potensi diri, kompetensi yang memadai, serta menjunjung tinggi nilai integritas dan profesionalitas.

Sejalan dengan hal tersebut, peran pegawai memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Pegawai, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan komponen kunci dalam aparatur negara yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat secara adil dan merata. Pegawai juga berperan sebagai penggerak utama yang menentukan kelangsungan organisasi dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Untuk menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, khususnya di era globalisasi dan perdagangan bebas, diperlukan program pengembangan pegawai yang sesuai dengan dinamika serta kebutuhan organisasi. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi pegawai harus menjadi fokus utama agar mereka mampu menunjukkan kinerja yang unggul.

Kinerja atau hasil kerja merupakan pencapaian nyata yang dapat diukur dan diperoleh baik oleh individu maupun organisasi dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi yang diembannya. Penilaian kinerja menjadi unsur penting karena dapat dijadikan sebagai tolak ukur kesuksesan suatu organisasi (termasuk pegawai) dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Peran pegawai memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Pegawai, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan komponen kunci dalam aparatur negara yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat secara adil dan merata, dan berperan sebagai penggerak utama yang menentukan kelangsungan organisasi dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, Bappeda memiliki fungsi utama dalam menyusun kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, menyusun rencana pembangunan, serta melakukan pembinaan di bidang perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan.

Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Konawe menghadapi berbagai kendala dan tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran dan sumber pendanaan, serta dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin kompleks. Oleh sebab itu, evaluasi kinerja pegawai Bappeda Kabupaten Konawe menjadi hal yang penting untuk mengukur peran mereka dalam mengelola dan melaksanakan tugas di lingkungan pemerintahan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok & Fungsi" (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe).

Tinjauan Pustaka

Konsep Kinerja dan Kinerja Pegawai Kinerja (performance)

didefinisikan sebagai hasil atau capaian kerja yang dihasilkan oleh individu atau organisasi dalam periode tertentu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Dalam lingkup kepegawaian, kinerja pegawai adalah wujud hasil kerja, baik secara kualitas maupun kuantitas, dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Kinerja merupakan padanan dari istilah *performance* yang menurut para pakar kerap diartikan sebagai penampilan, prestasi, atau hasil dari suatu pekerjaan (Yeremias T. Keban, 2004). Secara asal-usul kata, kinerja berasal dari kata "kerja" yang berarti pencapaian atau prestasi kerja. Dalam lingkup organisasi, kinerja dapat dipahami sebagai indikator yang menunjukkan sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kinerja tidak mengukur sisi pribadi pegawai, melainkan lebih menekankan pada rangkaian hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam jangka waktu tertentu (Sally Walelang, 2020).

Suyadi Prawirosentono dalam Walelang (2020) menjelaskan bahwa kinerja adalah performance, yaitu hasil kerja yang dihasilkan oleh individu atau kelompok dalam organisasi, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang melekat, serta dicapai secara sah tanpa melanggar aturan atau kode etik yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, Bastian dalam Hassel Nogi (Encyclopedia of Public Policy, 2003) yang dikutip oleh Yeremias T. Keban (2004) menyatakan bahwa kinerja menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai hasil sesuai dengan tujuan dan target yang telah direncanakan. Kinerja pegawai dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kompetensi individu, usaha yang dicurahkan, serta dukungan dari lingkungan organisasi. Untuk mengukur kinerja, indikator yang umum digunakan meliputi:

- Kualitas kerja
- Kuantitas kerja
- Ketepatan waktu
- Efisiensi/Efektivitas
- Keterampilan berkomunikasi (Kemampuan komunikasi)

Konsep Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja (performance appraisal)

Penilaian kinerja kerap dinamakan dengan sebutan performance evaluation atau performance appraisal. Istilah appraisal berakar dari bahasa Latin *appratiare* yang artinya memberi penilaian atau menetapkan nilai. Penilaian kinerja adalah suatu proses pemberian penilaian terhadap hasil kerja yang dikerjakan oleh seseorang yang kemudian diberi imbalan berbentuk kompensasi, apresiasi, atau ganjaran. Penilaian kinerja dinilai sebagai metode yang paling objektif dalam memberikan apresiasi atau imbal jasa kepada tenaga kerja. Menurut Leon C. Menggison (1981) dalam Lomempow, dkk. (2021), penilaian kinerja (Performance Appraisal) adalah sebuah proses yang dilakukan pimpinan untuk mengevaluasi apakah seorang pegawai sudah menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan akuntabilitas yang diembannya. Merupakan sistem baku yang digunakan organisasi untuk menilai pencapaian kerja pegawai secara berkala. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur, menilai, serta memengaruhi berbagai aspek pekerjaan dan perilaku karyawan. Secara fungsional, evaluasi kinerja berperan sebagai:

- Penilaian Hasil Kerja: Mengukur sejauh mana karyawan memenuhi target dan standar yang berlaku.
- Pemberian Umpan Balik: Menyediakan masukan membangun yang krusial untuk pengembangan diri dan peningkatan kinerja.
- Dasar Pengambilan Keputusan: Menjadi acuan bagi manajemen dalam keputusan SDM seperti kenaikan jabatan, gaji, atau penyusunan program pelatihan.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Menurut beberapa ahli, pengertian tugas dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Dale Yoder dalam Moekijat (1998) menyatakan bahwa tugas merupakan unsur pembentuk dari suatu jabatan. Stone dalam Moekijat (1998) menjelaskan tugas sebagai kegiatan spesifik yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu. John & Mary Miner dalam Moekijat (1998) menekankan bahwa tugas adalah aktivitas terstruktur dalam organisasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Moekijat (1998) berpendapat bahwa tugas merupakan bagian dari posisi kerja yang tersusun atas dua atau lebih elemen yang membentuk satu kesatuan aktivitas yang utuh.

Tugas pokok adalah rincian tugas yang menjadi tanggung jawab utama seorang pegawai atau satuan kerja, yang bersifat hierarkis dan mengikat. Sementara itu, fungsi merujuk pada rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh suatu unit kerja atau instansi untuk mencapai tujuannya. Dalam konteks Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), fungsinya mencakup penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana pembangunan, serta pembinaan di bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, dan pengembangan daerah.

Pengertian fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegunaan suatu objek, manfaat yang dimiliki, serta tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Menurut Sutarto dalam buku Zainal (2008), fungsi didefinisikan sebagai rincian pekerjaan yang bersifat sama atau saling berkaitan yang wajib dilaksanakan oleh seorang pegawai tertentu, di mana setiap rincian tersebut didasarkan pada kelompok aktivitas yang sejenis menurut karakteristik atau metode pelaksanaannya. Secara keseluruhan, penelitian tentang evaluasi kinerja sangat penting untuk menentukan arah perkembangan instansi pemerintah, karena kinerja suatu instansi merefleksikan keberhasilan atau kegagalan tujuan organisasi yang telah direncanakan.

B. Metodologi

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai pelaksanaan dan penilaian kinerja pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) di lokasi penelitian, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Konawe, yang merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive (bertujuan), yaitu pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui dan memiliki informasi relevan tentang kinerja pegawai dan pelaksanaan Tupoksi di Bappeda Kabupaten Konawe. Informan utama meliputi pejabat struktural (Kepala Badan atau Sekretaris), Kepala Bidang terkait, dan Staf Pelaksana yang bertugas langsung dalam kegiatan perencanaan dan evaluasi.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis:

- Data Primer: Diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam, mencakup pandangan dan informasi terkait penilaian kinerja pegawai, tantangan, dan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja.
- Data Sekunder: Diperoleh melalui studi dokumen dan arsip resmi instansi, seperti gambaran umum lokasi penelitian, struktur organisasi, data pegawai, serta dokumen Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

- Observasi: Melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas dan interaksi pegawai di lingkungan Bappeda Kabupaten Konawe terkait pelaksanaan tugas dan fungsi mereka.
- Wawancara: Mengajukan serangkaian pertanyaan terbuka kepada informan terpilih untuk menggali data primer
- Telaah Dokumen (Document Review): Menganalisis dokumen-dokumen terkait kinerja, perencanaan, Tupoksi, dan data kepegawaian.

Fokus Analisis dan Indikator Kinerja

Penelitian ini berfokus pada evaluasi kinerja pegawai, yang diukur berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

- Mutu (Kualitas) pelaksanaan tugas
- Jumlah (Kuantitas) hasil kerja
- Ketepatan waktu penyelesaian tugas
- Efisiensi/Efektivitas kerja
- Keterampilan berkomunikasi

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Prosedur analisis data umumnya meliputi tahapan: reduksi data, penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, di mana peneliti mengorganisasi temuan, merangkum data, mengkategorikan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kinerja pegawai.

C. Hasil dan Pembahasan

Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan perencanaan pembangunan daerah memiliki tugas pokok dan fungsi membantu kepala daerah dalam merumuskan dan menyusun kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah. Badan perencanaan pembangunan daerah bertanggung jawab dalam menyusun dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dasar hukum yang mengatur ini tertera pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 peraturan tersebut memberikan panduan rinci tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, yang menjadi acuan operasional utama bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Membahas tentang persoalan tugas pokok dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe, berdasarkan kerangka pikir penelitian yang penulis gunakan, yaitu : (1) Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan, (2) Pengendalian Pembangunan Daerah, (3) serta Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah merupakan proses implementasi rencana pembangunan yang akan menjadi tindakan nyata dilapangan, ini meliputi berbagai tahapan, mulai dari penyusunan rencana, penetapan rencana. secara sederhana pelaksanaan perencanaan pembangunan adalah mewujudkan tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Hal ini diungkapkan oleh informan, (SA) selaku kepala badan mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan, yakni: "Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang kami lakukan itu saat ini sudah berjalan sesuai dengan siklus perencanaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kami mengedepankan prinsip partisipatif, artinya semua stakeholder termasuk masyarakat melalui musrenbang mulai dari desa hingga kabupaten itu terlibat aktif.

Hal ini diungkapkan oleh informan, (SJ) mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe, yakni: "Secara umum memang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat penting karena tujuannya itu membangun daerah melalui perencanaan pembangunan dan itu prosesnya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari desa sampai kabupaten. Jadi masyarakat itu punya kesempatan buat menyampaikan usulannya, terus nanti kami bappeda bantu merangkum dan mengumpulkan data-data apa yang menjadi prioritas pembangunannya nanti"

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh informan, (IR) mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan, yaitu: "Tupoksi Bappeda itu memang sangat penting untuk keberlanjutan hidup masyarakat, tapi terkadang tantangannya juga cukup banyak, salah satunya itu kadang usulan dari masyarakat banyak sekali, karena kitakan musrenbang mulai dari tingkat desa sampai kabupaten, tapi anggaran kita itu terbatas jadi kita harus benar-benar selektif dan memilih mana yang paling prioritas".

Selain itu hal tersebut juga di ungkapkan oleh informan, (MG) tentang tupoksi bappeda mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan, yakni: "Pelaksanaan perencanaan pembangunan memang harus di kedepankan walaupun saya bukan perencana langsung, peran saya lebih ke mendukung proses perencanaan dari sisi teknologi, semua data usulan program sampai penganggaran masuk. Jadi dipastikan sistemnya berjalan lancar dan datanya aman sehingga proses pelaksanaan perencanaan pembangunan berjalan lancar"..

Seperti yang di ungkapkan juga oleh informan, (SM) mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan, yaitu sebagai berikut:

"Jadi secara garis besar, pelaksanaan perencanaan pembangunan itu kita mulai dari tahapan aspirasi masyarakat melalui musrenbang, setelah itu kami melakukan sinkronisasi agar seluruh usulan masuk dalam arah pembangunan yang sudah direncanakan, tapi kadang ada program yang sudah direncanakan tapi tidak terlaksana sesuai target karena faktor teknis, perubahan kebijakan, atau keterbatasan anggaran".

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh informan, (RR) mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan, yakni: "Jadi proses tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan itu dimulai dari usulan melalui musrenbang desa hingga kabupaten dan tidak semuanya bisa langsung dilaksanakan, karena biasanya jumlah usulan jauh lebih banyak dibanding anggaran yang tersedia sehingga kami harus benar-benar selektif dan memprioritaskan berdasarkan urgensi. Jadi memang harus ada proses seleksi yang ketat sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan berjalan dengan lancar".

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai tugas pokok dan fungsi mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat menentukan arah pembangunan daerah dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah harus

dilakukan dengan benar-benar selektif sehingga proses pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai tujuan pencapaian untuk daerah.

2. Pengendalian Pembangunan Daerah

Pengendalian pembangunan daerah merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, baik dari segi waktu, sasaran, maupun anggaran. Proses ini mencakup pemantauan, pengawasan, dan analisis terhadap pelaksanaan pembangunan. Selain itu, pengendalian pembangunan daerah juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan dilapangan.

Hal ini diungkapkan oleh kepala badan, (SA) mengenai pengendalian pembangunan daerah, yakni: "Kami sebagai perencana pembangunan itu memiliki peran strategis juga dalam pengendalian pembangunan daerah, yaitu memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan itu selaras dengan dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga menjadi tugas kami untuk memantau dan mengevaluasi".

Sementara itu ungkapan oleh informan, (SJ) menjelaskan mengenai pengendalian pembangunan daerah, yakni: "Jadi pengendalian pembangunan itu intinya sebuah proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan bisa berjalan sesuai arah, tujuan, dan target yang ditetapkan. Dipastikan kegiatan yang sudah di anggarkan benar-benar dijalankan dan tidak keluar jalur".

Selain itu hal tersebut juga disampaikan oleh informan, (IR) terkait penjelasan pengendalian pembangunan daerah, yakni: "Pengendalian pembangunan daerah itu bisa dibilang seperti proses mengawasi jalannya pembangunan, kita cek apakah program yang sudah direncanakan benar-benar dilaksanakan dilapangan, sesuai jadwal, anggaran, dan tujuannya sehingga menjadi tugas kami sebagai pegawai"..

Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan, (MG) mengenai penjelasan pengendalian pembangunan daerah, yakni: "Secara umum, pengendalian pembangunan daerah itu adalah proses untuk memastikan semua program dan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan benar-benar dilaksanakan sesuai waktu yang sudah ditentukan dan saya kebetulan bukan yang langsung atau mengevaluasi program, tapi saya mendukung dari sisi teknologi"..

Hal tersebut juga diungkapkan mengenai penjelasan pengendalian pembangunan daerah oleh informan (SM), yaitu: "Jadi pengendalian pembangunan daerah itu bagian dari siklus pembangunan yang fungsinya untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan dalam dokumen perencanaan benar-benar dilaksanakan dilapangan".

Selain itu hal tersebut juga di ngkapkan oleh informan, (RR) mengenai penjelasan pengendalian pembangunan daerah, sebagai berikut:

"Pengendalian pembangunan daerah merupakan proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan baik itu jalan, jembatan, air bersih, maupun penataan wilayah benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan. Jadi, bukan cuma asal membangun, tapi sesuai dengan anggaran, lokasi yang tepat, dan waktu yang sudah ditentukan"..

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe bahwa pengendalian pembangnan daerah merupakan proses untuk menuju tujuan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan dan memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan benar-benar sesuai dengan anggaran, dan waktu yang telah ditentukan.

3. Pengawasan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan benar-benar dilaksanakan sesuai target, waktu, dan anggaran yang ditetapkan. Disisi lain pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah merupakan proses sistematis untuk menilai tingkat pencapaian hasil pembangunan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Hal ini disampaikan oleh informan, (SA) selaku kepala badan mengenai pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, yakni: "Sebagai instansi perencana pembangunan, kami memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Kami

memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan”.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan, (SJ) mengenai pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe, yakni: “Jadi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah itu dilakukan secara berkala, terutama melalui kegiatan monitoring dan kami kumpulkan laporan terkait capaian fisik dan keuangan program yang sudah direncanakan. Terus laporan itu kita evaluasi dan kami buat analisisnya apakah pelaksanaannya sudah sesuai perencanaannya atau tidak”.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan (IR), yakni: “Pengawasan dan evaluasi itu memang betul-betul sangat penting karena dalam konteks pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengawasan dan evaluasi itu dilakukan untuk memastikan program-program dan kegiatan yang sudah direncanakan benar-benar dijalankan sesuai arah kebijakan dan perencanaannya”

Hal senada juga diungkapkan oleh informan (MG) mengenai bagaimana proses yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, yakni: “Jadi, proses pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah itu saya sebagai pranata ahli komputer melakukan pengawasan dan evaluasi melalui system informasi teknologi atau web dan itu juga dilakukan secara berkala melalui mekanisme monitoring dan evaluasi tujuannya memastikan apakah program dan kegiatan sudah dijalankan sesuai perencanaan pembangunannya”.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan (SM), yakni: “Pengawasan dan evaluasi itu tidak hanya menilai hasil pembangunan tapi kita pastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap berada di jalur yang di rencanakan. Kita memulai dari proses perencanaan dengan menyusun perencanaan yang jelas dan terukur. Nantinya, perencanaan itulah yang menjadi acuan dalam pengawasan dan evaluasi melalui forum-forum rapat”. Selain itu juga diungkapkan oleh informan (RR), yakni: “Soal pengawasan dan evaluasi kami pastikan apa yang sudah direncanakan benar-benar dilaksanakan walaupun setiap triwulannya dilakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi sehingga perencanaan pembangunan daerah benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan, anggaran dan waktu yang sudah ditentukan”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai pengawasan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dapat disimpulkan bahwa proses mengawasi dan mengevaluasi merupakan proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai perencanaan, anggaran, serta target waktu yang ditentukan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis deskriptif kualitatif mengenai evaluasi kinerja pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Konawe dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Pegawai secara Umum: Kinerja pegawai Bappeda Kabupaten Konawe dalam melaksanakan Tupoksi secara keseluruhan berada dalam kategori baik. Ini tercermin dari kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas perencanaan, pelaporan, dan evaluasi dengan tingkat Kualitas, Kuantitas, Ketepatan Waktu, dan Efektivitas yang memadai. Pegawai telah menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi (seperti SIPD dan e-Monev) secara optimal, yang menunjang efektivitas kerja.
2. Indikator Kinerja yang Menonjol: Indikator Efektivitas dan Kuantitas menunjukkan capaian yang paling positif, didukung oleh tingkat pendidikan yang relevan dan kepemimpinan yang partisipatif.
3. Tantangan Kinerja: Meskipun kinerja secara umum baik, terdapat beberapa isu yang menjadi penghambat optimalisasi, yaitu: a. Pemerataan Beban Kerja: Adanya pembagian tugas yang tidak merata di antara pegawai. dan b. Komunikasi Eksternal: Kurangnya kemampuan pegawai untuk menyederhanakan bahasa teknis perencanaan, yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang.
4. Implikasi Manajerial: Untuk meningkatkan kinerja, Bappeda perlu fokus pada perbaikan sistem manajerial internal, khususnya dengan merumuskan ulang distribusi beban kerja agar lebih seimbang dan memastikan bahwa program pelatihan mencakup peningkatan

keterampilan komunikasi publik agar perencanaan pembangunan dapat lebih aspiratif dan partisipatif.

E. Referensi

- Antartila Rizki Aziz, (2018). Evaluasi Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Cacat Tuna Netra Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitas Penyandang Cacat Netra Provinsi Sumatera Selatan (*jurnal*).
- Apriani Marcelina Situmeang, (2016). Evaluasi Kinerja Pegawai dalam Pelaksanaan Pelayanan Di Kantor Kecamatan Balikpapan Kota (*jurnal*)
- Adi Mora Tunggul, R. Rizal Isnanto, Oky Dwi Nurhayati, (2016). Evaluasi Kinerja Organisasi Publik dengan Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard dan Analytic Network Process (*jurnal*).
- Annisa Wijayanti, Supra Wimbarti, (2012). Evaluasi dan Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja Pada PT HKS (*jurnal*).
- Danan Dwi Mulyono, 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta. *Thesis (unpublished)*. Slamet Riyadi University at Surakarta.
- Hilma Harmen , Dina Sarah Syahreza , Adha Mahyundari ,Azri Nuansa Indah , Rey Septianislaus Togatorop , Olivia Sembiring ,Maysri Handayani Putri Sinaga , Nazwa Aulia Putri (2024). Mendorong Kinerja Karyawan Melalui Penilaian Yang Objektif Dan Terarah: Penerapan Behaviorally Anchored Rating Scale dan Management By Objectives (*jurnal*).
- Hartini, (2023). Penilaian Kinerja(*jurnal*).
- Ilham Saputra , Hayatul Khairul Rahmat, (2024). Evaluasi Kinerja Karyawan dalam Suatu Perusahaan: Sebuah Kajian Kepustakaan (*Journal of Current Research in Management, Policy, and Social Studies*).
- Jabal Arfah, Yuliana Musin, (2017). Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Desa (Dad) dalam Percepatan Pembangunan Desa Di Kabupaten Konawe (*jurnal teropong aspirasi politik islam*).
- Junadi, (2021). Evaluasi Kinerja Pegawai Pada Sub Bidang Program dan Pelaporan Di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro (*jurnal*).
- Jafar Abdurrahman, Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Kinerja Para Pegawai Di Kantor Pemerintahan (*jurnal*).
- Nurmiyanti Wulandari, Moch.Mustam Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Tembalang Kota Semarang (*jurnal*).
- Rofi Ramdani, Herabudin, Salamatul. (2020). Evaluasi Kinerja Pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.
- Reza Maharani Putri Tizaka, Achluddin Ibnu Rochim, (2024). Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance di Kecamatan Asemrowo (*Jurnal Relasi Publik*).
- Raja Juarisman, Harapan Tua, R.F.S, dan Ali Yusri, (2020). Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik(*jurnal*).
- Takwim, Ansar, T., & Sukarmin. (2024). Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Konawe. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*.
- Ulfa Dwi Lestari Anwar (2022). Analisis Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang (*skripsi*).
- Viola Lumempow, Johnny H., Posumah Helly F. Kolondam. (2021). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi (*Studi di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan*)
- Yulmi Manangin, Sri Yulianty Mozin, Rustam Tohopi, (2024). Evaluasi Kinerja Pelayanan Pegawai Perpustakaan Di Kantor Dinas Kearsipan